

ABSTRAKSI

Peranan Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Mengubah Kawasan Malioboro dari Zona Merah (Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual) ke Zona Hijau

Adetya Angga Saputra¹, Hariyanto.²

Penelitian ini memiliki 3 tujuan yang hendak di capai, yaitu untuk mengetahui dan mengkaji peranan BPBPKI Provinsi DIY dalam upaya mengubah kawasan Malioboro dari Zona Merah (Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual) ke Zona Hijau, untuk mengetahui dan mengkaji upaya apa saja yang dilakukan BPBPKI Provinsi DIY dalam mengubah kawasan Malioboro dari Zona Merah (Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual) ke Zona Hijau serta untuk mengetahui dan mengkaji hal apa saja yang menjadi kendala BPBPKI Provinsi DIY dalam upaya mengubah kawasan Malioboro dari Zona Merah (Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual) ke Zona Hijau.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis-empiris, yang mana penelitian bersifat yuridis ini adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal dan kenyataan yang bersifat yuridis. Di sisi lain juga bersifat empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data primer. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Hasil penelitian yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah bahwa peranan serta upaya BPBPKI dalam mengubah kawasan Malioboro dari Zona Merah (Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual) ke Zona Hijau dilaksanakan dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian daerah DIY, melakukan pelayanan advokasi serta melakukan rekayasa sosial. Kendala internal yang dihadapi BPBPKI adalah terkait dengan minimnya SDM, perubahan struktural pimpinan dan staf yang cepat, terlalu banyaknya tugas dan fungsi dan keterbatasan anggaran, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi adalah keterbatasan kewenangan, minimnya kesadaran dari pembuat karya dan pelaku usaha terhadap regulasi.

Kata kunci: advokasi, bisnis, peranan, regulasi, rekayasa sosial.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Staf Pengajar Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah

ABSTRACT

***The Role Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual of
Special Region of Yogyakarta in the Effort of Changing Malioboro Area from a
Red Zone (Intellectual Property Violation) to a Green Zone.***

Adetya Angga Saputra³, Hariyanto.⁴

This study has three objectives to be achieved, namely to identify and assess the role BPBPKI DIY Province in an effort to change the Malioboro area of the Red Zone (Violation of Intellectual Property Rights) to the Green Zone, to determine and assess what is being done BPBPKI DIY Province in change the Malioboro area of the Red Zone (Violation of Intellectual Property rights) to the Green Zone and to investigate study what are the constraints BPBPKI DIY Province in an effort to change Malioboro region of the Red Zone (Violation of Intellectual Property rights) to the Green Zone.

The research methods used in the writing of this law is the juridical-empirical, which is the study juridical approach to the problems regarding matters and juridical reality. On the other side also is empirical, ie research that uses primary data. Primary data obtained from interviews with informants and respondents, while secondary data obtained from the research literature through primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials

The research result of this writing is that the role and the effort of BPBPKI in changing Malioboro from a Red Zone (Violation of Intellectual Property Rights) to a Green Zone is done with a good coordination with the police of Special Region of Yogyakarta, doing an advocational service and also conducting a social engineering. The Internal Obstacles faced by BPBPKI is related to the minimal amount of human resources, the change of the structure of leader and staffs which happens quickly, the high amount of tasks and functions and the limited fund. The external obstacles faced by the BPBPKI is a limited authority, minimal amount of awareness by the creators and the businessmen on the existing regulation.

Keywords : advocacy, business, role, regulation, social engineering.

³ Students of the Faculty of Law, University of Gadjah Mada.

⁴ Lecturer in Business Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.